

27026-Article Text-76613-1-2- 20220129

by Jurnal Review Of Ir

Submission date: 28-Jun-2022 11:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1864007696

File name: 27026-Article_Text-76613-1-2-20220129.docx (59.47K)

Word count: 3321

Character count: 23122

NASIONALISME VAKSIN SEBAGAI PRAKTIK NEOMERKANTILISME: ANALISA STUDI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Wildan Faisol
Nizar Umar
Universitas Al-Azhar Indonesia
wildan.faisol@uai.ac.id

Abstrak

Pada awalnya isu kesehatan merupakan tugas utama bagi setiap negara kepada masing-masing rakyatnya. Tetapi kini isu kesehatan telah menjadi bagian dari isu global yang segala dinamikanya turut **6**uk menjadi fokus dalam berbagai kerjasama internasional. Dalam hal ini **pandemi Covid-19 yang telah berjalan setahun lebih di dunia semenjak merebaknya di Tiongkok**, kini telah ditemukan berbagai inovasi tentang vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19. Inovasi dalam produksi vaksin Covid-19 ini dikendalikan oleh berbagai perusahaan farmasi internasional. Tetapi dalam hal distribusi vaksin Covid-19 secara global justru tampak praktik-praktik proteksionisme yang dilakukan beberapa negara dengan tujuan untuk mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 bagi kebutuhan dalam negerinya. Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan bahwa praktik-praktik Nasionalisme Vaksin yang terjadi ketika era pandemi Covid 19 merupakan pengembangan kebijakan dari perspektif Neomerakantilisme dalam studi ekonomi politik internasional. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari **4**nelitian ini menjelaskan bahwa praktik Nasionalisme vaksin merupakan **langkah-langkah yang ditempuh oleh negara-negara maju dalam memperlakukan vaksin sebagai komoditas strategis bukan sebagai komoditas publik secara global. Negara-negara berkembang dan kurang berkembang berpotensi 5**tuk mengalami hambatan mengakses ketersediaan vaksin dalam menangani **pandemi Covid-19**.

Kata Kunci : Pandemi, Covid 19, Nasionalisme, Neomerkantilisme, Vaksin

Abstract

“no one is safe until everyone is safe”

Latar Belakang

Sejarah dunia sejak abad 14 hingga kini telah mengalami berbagai macam bentuk krisis yang terjadi dalam skala global. Dari krisis secara politik, krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan dan krisis kesehatan. Untuk yang terakhir, krisis kesehatan telah terjadi semenjak tahun 1300an dalam bentuk pandemi suatu wabah penyakit menular. Pada abad pertengahan Eropa abad 14 terjadi fenomena

wabah *Bubonic Plague (Black Death)* yang mengakibatkan korban jiwa hampir setara dengan 1/3 populasi masyarakat Eropa ketika itu (History, 2010). Kemudian kawasan Eropa kembali mengalami fenomena wabah pandemi penyakit yaitu *Spanish Flu* pada tahun 1918 yang mencatat korban jiwa hingga jutaan masyarakat Eropa. Sedangkan wabah penyakit yang seringkali muncul semenjak 3 dekade terakhir di berbagai kawasan dunia diantaranya HIV/Aids, Avian Influenza, SARS, MERS, Ebola (Mas'udi & Winanti, 2020). Kemudian semenjak akhir tahun 2019, dunia kembali dihadapkan dengan fenomena pandemi virus Covid-19 yang memberikan berbagai permasalahan secara lebih kompleks.

Fenomena pandemi virus Covid-19 memberikan berbagai macam permasalahan baru dalam aspek hubungan internasional. Dalam sektor keamanan internasional, pandemi virus Covid-19 kembali menekankan pentingnya untuk menaruh perhatian lebih pada aspek-aspek keamanan non tradisional seperti isu kesehatan. Dalam sektor ideologi politik, pandemi virus Covid-19 berkembang bersamaan ketika kepemimpinan politik ala "*Populisme*" yang mengusung pemikiran Ultranasionalisme dan cenderung anti-sains menyebar diberbagai kawasan seperti Eropa, Amerika dan Asia (Mas'udi & Winanti, 2020). Selain itu dalam sektor teknologi, pandemi virus Covid-19 kembali memperlihatkan kesenjangan kemajuan teknologi antar negara-negara maju dengan negara berkembang dan kurang berkembang dalam proses indentifikasi potensi ancaman dari virus tersebut. Seluruh negara diharapkan memiliki sistim kesehatan yang bagus dengan disertai memiliki anggaran finansial yang mapan sehingga negara memiliki banyak opsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam mencegah efek dari pandemi virus Covid-19.

Pandemi virus Covid-19 dimulai sejak virus tersebut dilaporkan ke WHO pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar ke berbagai negara secara cepat. Dalam meminimalisir pandemi virus Covid-19, negara-negara dituntut untuk membangun sistim kesehatan, fasilitas kesehatan dan protokol mitigasi yang mapan. Dalam membangun fasilitas kesehatan yang mapan juga diharapkan turut serta melakukan penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19. Salah satu negara seperti Amerika Serikat (AS) telah menyiapkan dana sebesar US\$ 8,3 Milliar (Rp 134 Triliun) untuk menangani pandemi virus Covid-19 yang kurang lebih US\$ 3 Milliar (Rp 32 Triliun) diantaranya telah dialokasikan untuk pengembangan produksi vaksin (Mas'udi & Winanti, 2020). Vaksin merupakan salah satu factor kunci penting dalam penanggulangan pandemi virus Covid-19. Seluruh negara-negara berusaha secepat dan sebanyak mungkin melakukan program vaksinasi terhadap masyarakatnya. Tetapi kemudian usaha ini dihadapkan oleh permasalahan bahwa ketersediaan stok vaksin Covid-19 di dunia sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan tingkat permintaan kebutuhan vaksin Covid-19 secara global (Ramadhan & Koestanto, 2021).

Harapan banyak negara-negara dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 secepat dan sebanyak mungkin justru dihadapkan berbagai permasalahan lain yaitu salah satunya produksi vaksin Covid-19 yang terkonsentrasi hanya pada berbagai negara-negara maju saja (Ramadhan & Koestanto, 2021). *World Health Organization* (WHO) sebagai institusi internasional dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak untuk tata kelola kesehatan global juga turut merasakan permasalahan rendahnya tingkat ketersediaan vaksin Covid-19 akibat produksi dan distribusinya secara besar dikuasai oleh beberapa negara maju saja. Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berpendapat bahwa fenomena ini merupakan bentuk dari “Nasionalisme Vaksin” (Farrer, 2020). Negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang memiliki kemajuan teknologi lebih rendah dari negara-negara maju terpaksa untuk mengantri lebih lama dalam mendapatkan ketersediaan vaksin Covid-19.

Dalam artikel ini penulis berusaha menjelaskan bahwa fenomena Nasionalisme Vaksin yang terjadi selama pandemi merupakan aplikasi dari perspektif Neomerkantilisme dengan dibalut semangat nasionalisme ekonomi dalam berbagai bentuk proteksionismenya.

Metodologi dan Teori

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk lebih mengutamakan implementasi data kualitatif yang akan diolah melalui hubungan antar kejadian satu dengan kejadian lainnya. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam data-data sekunder untuk digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk teknik analisis data, peneliti akan menggunakan metode penelitian analitis. Penelitian jenis analitis adalah penelitian dengan unsur deskriptif yang memahami dan menganalisa masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Neomerkantilisme

Salah satu pendekatan klasik dalam studi Ekonomi Politik Internasional yang memandang negara sebagai aktor utama dalam aktivitas perdagangan internasional adalah Merkantilisme. Dalam Merkantilisme, aktor negara mengasosiasikan aktivitas perdagangan internasional sebagai arena perebutan kekayaan dan kekuasaan, oleh karena itu dalam setiap interaksinya merupakan *zero sum game*. Negara harus dapat mengendalikan arus barang dan faktor modal yang keluar dan masuk dari negara lain. Dengan kata lain mekanisme perdagangan internasional tidak dijalankan sesuai prinsip *free trade* seperti yang diasumsikan oleh pendekatan Liberalisme tetapi dijalankan berdasarkan kebijakan setiap negara. Pendekatan ini dipopulerkan oleh negara-negara Eropa pada abad 16 hingga 19 ketika sedang melakukan proses kolonisasi di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin. Negara-negara Eropa Ketika itu secara masif berupaya untuk menghasilkan surplus perdagangan yang

kemudian disalurkan kepada industri dalam negeri supaya industri lokal dapat besar dan menghindari ketergantungan impor dari luar negeri. Dalam rangka meningkatkan kekayaannya, negara-negara Eropa mengeskplotasi negara-negara jajahannya baik di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin dengan menguasai komoditas emas, perak, logam mulia, hasil perkebunan dan rempah-rempah. Dengan mengeskplotasi wilayah jajahannya kemudian negara-negara Eropa dapat mengakumulasi kekayaannya sehingga dapat memiliki struktur perekonomian yang kokoh.

Pada masa perdagangan modern (abad 20 & 21), praktik-praktik perdagangan Merkantilisme masih sering dipraktikkan oleh banyak negara dengan berbagai bentuk. Yang berbeda dengan praktik Merkantilisme pada abad 20 & 21 lebih kepada munculnya bentuk hambatan-hambatan perdagangan non-tarif meskipun telah terdapat institusi-institusi internasional yang bergerak dalam hal perdagangan internasional salah satunya WTO. Berbagai macam kesepakatan perdagangan yang telah diatur melalui negara-negara anggota WTO tetap memberikan celah bagi negara-negara untuk melakukan kebijakan perdagangan Merkantilisme dengan berbagai bentuk proteksionisme perdagangan non-tarif. Segala bentuk praktik proteksionisme perdagangan pada abad 20 & 21 diistilahkan dengan Neomerkantilisme oleh berbagai akademisi. Praktik-praktik Neomerkantilisme ini menghambat upaya dari negara-negara berkembang yang berusaha menikmati keuntungan dari perdagangan bebas yang terus diagendakan semenjak setelah Perang Dunia II, pembentukan WTO hingga era pandemi virus Covid-19 kini.

Analisa

a. Nasionalisme vs Globalisasi

Politik Internasional sepanjang abad 20 menegaskan bahwa faktor nasionalisme dan keberadaan aktor negara merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Perlahan tapi pasti mulai faktor nasionalisme dan aktor negara menghadapi berbagai tantangan pada akhir abad 20 dengan semakin masifnya aktor-aktor non-negara mempengaruhi dinamika politik internasional (Lay, 2006a). Institusi-institusi supranasional seperti PBB, ⁹ Bank Dunia (*World Bank*), *International Monetary Fund* (IMF), Uni Eropa. Pada waktu yang relatif bersamaan (semenjak akhir perang dingin hingga akhir abad 20), banyak negara-negara baru muncul pasca runtuhnya Uni Soviet dan terjadi pergeseran identitas diri manusia yang awalnya dibangun atas dasar batas-batas territorial negara menjadi atas nilai-nilai budaya, agama, ideologi politik, dan kesamaan etnik (Lay, 2006b). Segala fenomena ini menunjukkan terdapat transisi era yang ditunjukkan dengan berkurangnya relevansi nilai-nilai nasionalisme dan membawanya kepada nilai-nilai globalisasi (Lay, 2006b). Transisi era ini dijalankan oleh aktor-aktor pengawal nilai-nilai globalisasi seperti PBB, IMF, *World Bank*, WTO dan lain lain.

Salah satu misi yang dijalankan oleh PBB dalam menegaskan nilai-nilai globalisasi ialah *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan serangkaian 17 target capaian yang diusung oleh negara anggota PBB untuk saling bekerja sama dalam berbagai isu seperti isu kesehatan, jender, lingkungan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Salah satu target penting dalam SDGs ialah isu kesehatan yang dipertanyakan capaiannya oleh negara-negara anggota PBB karena kini tata kelola kesehatan global sedang berusaha mengatasi pandemi virus Covid-19.

b. Produksi Vaksin

Beberapa negara berkembang berasumsi bahwa produksi vaksin Covid-19 dapat ditingkatkan jika unsur hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atas vaksin Covid-19 dapat dihapus (Ramadhan & Koestanto, 2021). Negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan dan India telah mengajukan usulan berupa peniadaan HAKI terhadap produksi vaksin Covid-19 kepada Dewan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPS) yang berada dibawah *World Trade Organizations* (WTO) (Anna, 2020). Usulan ini diajukan demi negara-negara berkembang dan tidak berkembang tidak dihadapkan dengan problem HAKI untuk mendorong industri farmasi di masing-masing negara dalam memproduksi vaksin Covid-19.

Dibawah kesepakatan TRIPS, monopoli terkait kekayaan intelektual memperlambat peningkatan produksi vaksin dan peralatan kesehatan lainnya. Efek monopoli tersebut terlihat dari lambatnya akses negara berkembang dan kurang berkembang terhadap produk vaksin ini. Meskipun dalam *TRIPS Agreement* di WTO telah dirancang mekanisme khusus untuk kepentingan kesehatan publik internasional. Diantaranya seperti hak suatu negara untuk memberikan lisensi wajib sebagai pengganti paten obat, kesempatan untuk membuat system oposisi paten pra-hibah dan menyusun indikator paten yang akuntabel dan tidak memberikan izin atas data pengujian vaksin. Namun hal ini dirasa belum cukup untuk mengatasi problem pandemi virus Covid-19 saat ini.

Usaha yang dilakukan oleh India dan Afrika Selatan pada bulan Oktober tahun 2020 demi memunculkan *TRIPS Waiver* supaya menjadi jalan untuk menciptakan akses vaksin yang lebih luas kepada seluruh negara di dunia serta diharapkan. Negara-negara besar dengan kemajuan teknologi farmasi dan kesehatannya seperti Australia, Kanada, Inggris, AS, Jepang dan negara-negara anggota Uni Eropa menjadi pihak yang melawan ide tentang *TRIPS Waiver* terhadap produksi vaksin Covid-19 tersebut.

c. Nasionalisme Vaksin

Vaksin merupakan produk manufaktur yang kompleks dan proses produksinya memakan biaya yang tidak sedikit. Dalam memproduksi vaksin setidaknya dibutuhkan beberapa langkah perencanaan

strategis khusus (Steenhuysen & Kelland, 2020). Pertama, pemurnian komposisi bahan baku. Kedua, menyiapkan zat-zat pengawet, zat adjuvant dan *stabilizer*. Ketiga, pengalokasian stok gelas kecil (*vials*) dan jarum suntik untuk melengkapi proses vaksinasi. Untuk langkah ketiga tersebut hanya mampu dilakukan oleh beberapa perusahaan farmasi saja, diantaranya perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari AS dan Eropa yang mampu memaksimalkan seluruh langkah strategis dalam produksi vaksin Covid-19.

Beberapa negara maju melalui pemerintahannya menandatangani perjanjian dengan perusahaan farmasi besar untuk menjamin keamanan jumlah ketersediaan vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan demi mengamankan populasi masyarakat di negaranya masing-masing untuk mendapatkan vaksinasi. Beberapa contohnya ialah pemerintahan Inggris yang telah melakukan perjanjian dengan Pfizer, BioNtech, AstraZeneca, Valneva dan Sanofi (Reuters, 2021). Pemerintah AS juga telah melakukan perjanjian dengan Pfizer dan Moderna (Breuninger, 2021). Keempat negara Eropa lainnya seperti Italia, Belanda, Jerman dan Prancis juga telah sepakat bekerja sama dengan Astra Zeneca (Ellyatt, 2020).

Fenomena Nasionalisme Vaksin mendorong banyak pemimpin-pemimpin negara untuk memprioritaskan masyarakatnya sendiri dalam proses produksi dan distribusi vaksin Covid-19. Salah satu perusahaan farmasi yaitu Pfizer bekerja sama dengan perusahaan farmasi dari Jerman yaitu BioNtech yang kemudian bekerja sama untuk memproduksi vaksin Covid-19 untuk yang pertama kalinya di dunia. Capaian atas kinerja Pfizer dan BioNtech ini menarik negara-negara maju untuk segera mengamankan alokasi ketersediaan vaksin Covid-19 yang akan diproduksi. Diantaranya ialah Uni Eropa yang telah menyepakati pembelian untuk 200 juta dosis vaksin dan membuka opsi untuk memperpanjangnya sebesar 100 juta dosis (Global Justice, 2020). Sedangkan Inggris telah menyepakati sebesar 40 juta dosis dan AS menyepakati pada angka sebesar 100 juta dosis dengan membuka opsi untuk menambah sebesar 500 juta dosis (Global Justice, 2020). Sedangkan negara-negara tersebut hanya merepresentasikan sekitar 14% dari populasi manusia secara global (Global Justice, 2020).

Situasi geopolitik dunia juga turut membangun narasi Nasionalisme Vaksin tersebut. Negara seperti AS dan Tiongkok sama-sama memandang penelitian dan pengembangan vaksin merupakan jalan bagi keduanya untuk meraih superioritas pada aspek kesehatan global. Sedangkan negara seperti Rusia telah lebih dulu mempertunjukkan vaksin buatannya dengan nama Sputnik V tetapi tidak terlalu direspon baik oleh komunitas internasional karena masih diragukan efektivitas vaksin tersebut (Al Jazeera, 2020). Rivalitas antara AS dan Tiongkok dapat memberikan gambaran bahwa kerjasama global dalam mencari solusi terhadap pandemi virus Covid-19 menjadi semakin susah untuk

direalisasikan. Bahkan sebelum muncul pandemi virus Covid-19, fenomena nasionalisme baru terus bermunculan dengan beberapa peristiwa terhambatnya kinerja forum-forum multilateralisme global seperti *Paris Agreement*, *TransPacific Partnership* dan dinamika keanggotaan Uni Eropa.

Kontestasi geopolitik dunia terkait vaksin Covid-19 berpotensi mendorong negara secepat mungkin dalam melakukan penelitian dan percobaan vaksin demi elektabilitas didepan publik negara masing-masing. Hal ini juga dikhawatirkan dilakukan secara cepat dengan tidak terlalu memedulikan berbagai regulasi dan protokol kesehatan dalam proses produksi vaksin Covid-19 sehingga efektifitas vaksin tersebut tidak maksimal. Jika vaksin yang masih kurang teruji efektifitasnya telah terdistribusikan di berbagai wilayah dunia justru dapat berpotensi memperburuk perkembangan kondisi pandemi virus Covid-19 dan dapat memunculkan sikap publik yang tidak meyakini efektivitas vaksin.

d. Deglobalisasi

Globalisasi yang digaungkan oleh banyak politisi dan akademisi sejak awal abad 21 diyakini telah mengalami perubahan dan juga beberapa meyakini globalisasi telah usai. Fenomena krisis ekonomi global tahun 2008 masih memberikan efek hingga kini karena pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pendukung utama globalisasi tidak lagi signifikan (Krugman, 2019). Akselerasi pertumbuhan ekonomi global pasca krisis ekonomi global tahun 2008 bergeser ke negara-negara industri di Asia. Pergeseran keuntungan atas perdagangan internasional ini yang memantik kemunculan kelompok-kelompok ultranasionalis dalam politik domestik negara-negara maju dengan membawa semangat nasionalisme baru dan bersikap skeptis terhadap globalisasi seperti nilai-nilai kosmopolitanisme dan multikulturalisme. Dalam pandangan hubungan internasional, kelompok-kelompok ultranasionalis cenderung berasumsi arena politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan dan pentingnya mengembalikan marwah peran negara dalam membangun relasi dengan negara lain. Cara pandang secara neo-merkantilisme merupakan cara pandang utama kelompok-kelompok tersebut dalam menyuarakan sikapnya terkait posisi negara-negara maju didalam konstelasi perdagangan internasional. Sikap skeptis terhadap skema rantai pasokan global dan menginginkan peran negara yang besar dalam perdagangan internasional dengan salah satunya menciptakan proteksionisme secara tarif dan non-tarif. Dalam konstelasi politik domestik negara-negara maju, kelompok ultranasionalis ini telah memiliki persentase kekuasaan secara mayoritas pada pemerintahan negara-negara seperti AS dan Inggris. Sedangkan kelompok ultranasionalis di negara-negara seperti Prancis, Jerman dan Italia belum memiliki kekuasaan secara mayoritas pada pemerintahan tetapi mengalami peningkatan popularitas yang signifikan selama 1 dekade terakhir.

d. Nasionalisme Vaksin sebagai Praktik Neomerkantilisme

Semenjak merebaknya wabah virus Covid-19 sejak bulan Desember tahun 2019 yang kemudian dideklarasikan sebagai pandemi virus Covid-19 sejak bulan Maret tahun 2020 oleh WHO, sikap- sikap proteksionisme yang dikemas dalam semangat nasionalisme baru oleh beberapa negara telah dipertunjukkan. Semangat nasionalisme baru tersebut ditunjukkan oleh aktor-aktor negara besar seperti Inggris dengan sikapnya memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa, Amerika Serikat yang menunjukkan sikap dengan keluar dari kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dalam isu lingkungan dan melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Dengan adanya fenomena pandemi Covid-19 ini menjadi tekanan baru untuk beberapa negara dalam mempertunjukkan semangat nasionalisme baru (Zarhloule, 2020). Fenomena pandemi virus Covid-19 menciptakan disrupsi global dalam alokasi alat kesehatan dan disrupsi ini dimunculkan oleh semangat nasionalisme baru dari berbagai aktor negara tersebut. Beberapa pengamat seperti Youde (2020) mendeskripsikan fenomena ini dengan istilah nasionalisme kesehatan (*Medical Nationalism*). Sedangkan istilah lain yang lebih populer karena beberapa kali diperbincangkan oleh WHO dan berbagai akademisi yaitu Nasionalisme Vaksin (*Vaccine Nationalism*). Nasionalisme Vaksin diantaranya ditunjukkan ketika pemerintahan suatu negara melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan farmasi untuk mengamankan vaksin bagi populasi masyarakatnya sendiri dan cenderung mengabaikan aspek bahwa vaksin sejatinya perlu dijaga sebagai *global public goods* demi menyelesaikan pandemi virus Covid-19 daripada dianggap sebagai komoditas strategis setiap negara. WHO sebagai perwakilan PBB yang bertugas untuk mengelola tata kelola kesehatan global juga melawan semangat nasionalisme vaksin ini dengan mengajak UNICEF dan beberapa organisasi lain dalam pembentukan *Covid-19 Vaccine Global Access* (COVAX).

Salah satu faktor utama dari mendominasinya semangat nasionalisme baru selama pandemi virus Covid-19 yaitu tensi persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok yang semakin tinggi. AS memulainya dengan menuduh Tiongkok tidak transparan dalam informasi tentang waktu yang pasti virus Covid-19 mulai muncul di Tiongkok yang kemudian menyebar ke seluruh dunia (Mahase, 2020). Kemudian AS juga menuduh WHO bekerja sama dengan Tiongkok dalam simpang siurnya informasi untuk mengatasi ancaman virus Covid-19. AS juga memutuskan untuk menarik dukungan dana terhadap WHO sebesar 400 juta US\$ sebagai bentuk hukuman terhadap WHO yang diasumsikan oleh AS sedang bekerja sama dengan Tiongkok selama pandemi virus Covid-19.

Salah satu kebijakan penting AS dalam menghadapi pandemi virus Covid-19 yaitu *Operation Warp Speed* (OWS). OWS merupakan kebijakan AS yang dibangun oleh Presiden Donald Trump dalam rangka pengembangan vaksin dan telah diumumkan secara publik sejak bulan April tahun 2020. AS menyiapkan dana yang tidak terbatas untuk program OWS demi tercapainya target produksi 300 juta vaksin pada bulan Januari tahun 2021 yang direncanakan akan digunakan untuk masyarakat

AS. Melalui OWS, AS mendapatkan 110 sampel vaksin Covid-19 yang masing-masing berasal dari perusahaan farmasi berbeda dan saling memiliki tingkat efektifitas yang berbeda juga. Kemudian dari 110 sampel vaksin tersebut, hanya 8 sampel vaksin yang telah melakukan percobaan terhadap manusia. 4 dari 8 vaksin tersebut berasal diproduksi oleh perusahaan farmasi dari Tiongkok. Kemudian program OWS berjalan dengan memprioritaskan sampel vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi yang tidak berasal dari Tiongkok. Langkah AS ini menggambarkan perspektif Neomerkantilisme yang dibangun dengan semangat nasionalisme baru dan berpotensi memunculkan tindakan serupa dari pihak Tiongkok sebagai respon balik.

Pada awal pandemi virus Covid-19 terjadi sempat muncul fenomena kelangkaan alat kesehatan yang diakibatkan larangan ekspor dari beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman. Sikap yang cenderung berlawanan dengan mekanisme pasar tunggal yang ada didalam Uni Eropa. Aktivitas melarang ekspor alat kesehatan ini merupakan bentuk aplikasi kebijakan proteksionisme yang diterapkan negara-negara maju. Negara-negara tersebut memanfaatkan peristiwa pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk menerapkan *incremental protectionism* (Mintarja et al., 2020).

Dalam artikel “*A World Less Open, Prosperous, and Free*” dari Stephen M. Walt berasumsi bahwa kemunculan pandemi virus Covid-19 semakin menegaskan aktor-aktor negara dalam bersikap proteksionis dan menggaungkan semangat nasionalisme (Walt, 2020). Ketakutan yang dikhawatirkan muncul selama dan setelah pandemi virus Covid-19 akibat dari semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh negara-negara maju adalah menciptakan bayangan ancaman ketakutan terhadap suatu kelompok khusus (Bieber, 2020). Kelompok secara khusus yang dimaksud ialah kelompok manusia yang rentan mengalami diskriminasi atau kelompok minoritas baik secara etnis, agama atau kewarnegaraan.

Harapan dalam menanggulangi pandemi virus Covid-19 dengan semangat multilateral dan mengedepankan pendekatan secara kolektif pada antar negara cenderung diabaikan akibat fenomena nasionalisme vaksin. Perilaku negara-negara maju dengan praktik-praktik Neomerkantilisme dengan mengedepankan semangat nasionalisme semu berimbas negatif terhadap penanggulangan pandemi virus Covid-19. Vaksin bukan dipandang sebagai *public goods* tetapi dipandang sebagai komoditas strategis negara seperti layaknya sumber energi seperti minyak, batu bara atau emas. Negara-negara maju yang telah mengalokasi ketersediaan vaksin dalam jumlah yang massif menciptakan potensi ancaman kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang tidak mampu memiliki akses untuk mengamankan ketersediaan vaksin dalam jumlah banyak dan masih memiliki tingkat penyebaran virus Covid-19 yang tinggi dalam masyarakatnya. Meskipun sejatinya setiap negara ingin lepas dari ancaman pandemi virus Covid-19 secepatnya dan segera ingin mengembalikan kekuatan

ekonominya masing-masing tetapi suatu ancaman yang bersifat lintas batas negara seperti pandemi virus Covid-19 sejatinya juga harus diatasi dengan semangat yang mendorong kerjasama kolektif multilateral antar negara. Semangat nasionalisme vaksin perlahan akan terus mendorong mundur semangat globalisasi terhadap nilai-nilai kosmpolitanisme. Pemulihan dari pandemi virus Covid-19 yang dikerjakan secara kolektif cenderung lebih memberikan keuntungan besar jika dibandingkan dengan semangat nasionalisme vaksin tersebut.

Kesimpulan

Tensi tinggi persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok telah dimulai bahkan semenjak dari sebelum peristiwa pandemi virus Covid-19 berupa perang dagang dan terhambatnya beberapa kerjasama multilateral. Kemunculan peristiwa pandemi virus Covid-19 menjadi katalis baru dalam peningkatan tensi geopolitik antar kedua negara. Terutama pada fase pengembangan vaksin Covid-19 yang tidak dikerjakan secara kolektif oleh berbagai negara tetapi dikerjakan secara eksklusif oleh negara-negara maju sesuai perspektif Neomerkantilisme dengan semangat nasionalisme vaksin. Fenomena global lintas batas negara akan selalu susah untuk ditemukan solusinya selama aktor-aktor negara tidak bekerja sama secara kolektif. Perilaku egois antar aktor negara dengan tidak memandang vaksin sebagai *public goods* akan mengancam negara-negara berkembang lain yang kurang memiliki sumber daya material dan kemajuan teknologi selayaknya negara maju untuk mengakses ketersediaan vaksin Covid-19.

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpar.ac.id

Internet Source

<1%

2

Hany Wihardja, Yustina Kristine Arif, Rosa Nora Lina. "FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA PERAWAT PELAKSANA DALAM MERAWAT PASIEN COVID-19 DI RS X, BANTEN", Jurnal Sehat Mandiri, 2021

Publication

<1%

3

media.neliti.com

Internet Source

<1%

4

es.scribd.com

Internet Source

<1%

5

jombersamapas.blogspot.com

Internet Source

<1%

6

www.kompas.com

Internet Source

<1%

7

www.kompasiana.com

Internet Source

<1%

8

www.pharmasindo.com

Internet Source

<1 %

9

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On